

# STUDI KOMPARASI KINERJA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI JAWA TENGAH

*Comparative Study on Sharia and Conventional Rural Agribusiness Development  
Performances in Central Java*

**Dedi Junaedi, Nurul Huda, Ranti Wiliasih, dan S. Gatot Irianto**

*Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam,  
Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta  
Email: dedijunaedi@gmail.com*

Naskah diterima : 18 Juli 2012

Naskah disetujui terbit : 30 Agustus 2012

## ABSTRACT

Objectives of this research are exploring the motives in selecting financial scheme for rural agribusiness development (PUAP), identifying factors affecting PUAP performance, assessing performance differences between conventional PUAP and sharia PUAP in Central Java during the period of 2008-2011. The study was conducted in Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal and Purbalingga Regencies during the period from July to December 2012 applying both qualitative and quantitative methods with a dummy-variable multiple regression. A number of 185 LKMA PUAP managers were interviewed with a purposive sampling method. The result shows that PUAP Sharia was chosen for a religious consideration (40.6%), while conventional PUAP LKMA was based on practical (35.3%) and economic reasons (30.2%). Free financing schemes (sharia) variable, LKMA age, number of members, manager's age and education level, capital, cost of credit, debt, and region were simultaneously and significantly affected the LKMA performance. Partially, effects of each independent variable on the performance are various. Based on liquidity (Quick Ratio) and profitability (Net Profit Margin) aspects, the sharia PUAP shows better performance than the conventional PUAP. The Sharia scheme only shows a negative correlation with the performance of the activity (Asset Turn Over). Solvabilities (Debt Equity Ratios) of both sharia and the conventional show no real effect.

**Keywords :** *agribusiness, liquidity, microfinance, profitability, PUAP, sharia, solvability*

## ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional di Jawa Tengah tahun 2008-2011. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal, dan Purbalingga selama periode Juli-Desember 2012, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *multiple regression dummy variable*. Sebanyak 185 manajer LKMA PUAP menjadi responden penelitian ini dengan pendekatan *purposive sampling*. Hasil riset menunjukkan PUAP syariah dipilih karena motif pertimbangan agama (40,6%), sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis (35,3%) dan ekonomi (30,2%). Variabel bebas skema pembiayaan (Sharia), usia LKMA, jumlah anggota, usia dan pendidikan manajer, modal, biaya, kredit, utang, dan kawasan secara simultan berpengaruh nyata terhadap kinerja LKMA. Secara parsial, pengaruh setiap variabel bebas terhadap kinerja bervariasi. Dari sisi likuiditas (*Quick Ratio*) dan profitabilitas (*Net Profit Margin*), kinerja PUAP syariah relatif lebih baik dari yang konvensional. Skema syariah hanya berkorelasi negatif dengan kinerja aktivitas (*Asset Turn Over*). Dan, terhadap kinerja solvabilitas (*Debt Equity Ratio*), syariah dan konvensional tidak berbeda nyata.

Kata kunci : *agribisnis, likuiditas, LKMA, profitabilitas, PUAP, solvabilitas, syariah*

## PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tumbuh positif dari tahun ke tahun. Namun, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. BPS mencatat, tahun 2012 jumlah penduduk miskin ada 29,13 juta jiwa (BPS, 2012). Dari jumlah tersebut, sekitar 18,48 juta jiwa atau 63,4 persen hidup sebagai petani di pedesaan. Mengingat mayoritas penduduk miskin adalah petani, maka pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan memiliki peran strategis.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani, menurut Apriyantono (2009, 2011) adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Departemen Pertanian (kini Kementerian Pertanian) menggulirkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebagai satu solusi untuk membantu pengembangan usaha tani yang umumnya *profitable* tetapi belum *bankable*. Terinspirasi keberhasilan Yunus mengembangkan Grameen Bank di Bangladesh, PUAP merupakan program rintisan untuk menumbuhkan kembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dengan prinsip bagi hasil atau skema *profit loss sharing* (syariah).

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan). Dalam Petunjuk teknisnya disebutkan bahwa dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Rp 100 juta per desa/gapoktan menjadi modal awal bagi unit usaha simpan pinjam milik gapoktan. Tumbuh dan berkembangnya LKMA PUAP menjadi indikator penting keberhasilan program PUAP secara keseluruhan.

Selama periode 2008-2011, PUAP telah dilaksanakan di 38.123 desa/gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis di pedesaan (Hendriawan, 2011). Dalam perjalanannya, gapoktan PUAP ternyata memiliki kinerja operasional yang bervariasi. Ada yang berkembang pesat dan tumbuh menjadi LKMA, ada yang masih berusaha tumbuh menjadi LKMA, ada yang jalan di tempat masih sebagai gapoktan pelaksana simpan-pinjam anggota.

Menurut hasil evaluasi Tim PUAP Pusat, kini sudah terbentuk sekitar 3.000 LKMA yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia (Hendriawan, 2011). Sebagian besar LKMA itu beroperasi seperti koperasi, menerapkan skema bunga pinjaman dan iuran anggota. Sementara sebagian kecil lainnya beroperasi dengan skema bagi hasil (*profit loss sharing*) atau sistem keuangan syariah (Sudaryanto, 2009).

Permasalahan yang menarik untuk dicermati ialah bahwa dari 4665 gapoktan PUAP selama periode 2008-2011, hampir separuhnya (2267) sudah berbentuk LKMA. Jumlah ini setara dengan 75,6 persen populasi LKMA PUAP secara nasional. Dari jumlah itu, sekitar 287 atau 12,66 persen LKMA di Jateng beroperasi dengan skema pembiayaan syariah. Sisanya, 82,34 persen beroperasi seperti LKMA konvensional, memakai skema bunga pinjaman. Berdasarkan data dan fakta tersebut, maka, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) apa saja yang menjadi motif gapoktan di Jawa Tengah dalam memilih LKMA dengan skema syariah atau konvensional; (2) faktor apa saja yang memengaruhi kinerja LKMA PUAP dengan skema syariah atau konvensional di Jawa Tengah; (3) apakah ada perbedaan kinerja antara LKMA PUAP skema syariah dengan LKMA PUAP skema konvensional di Jawa Tengah;

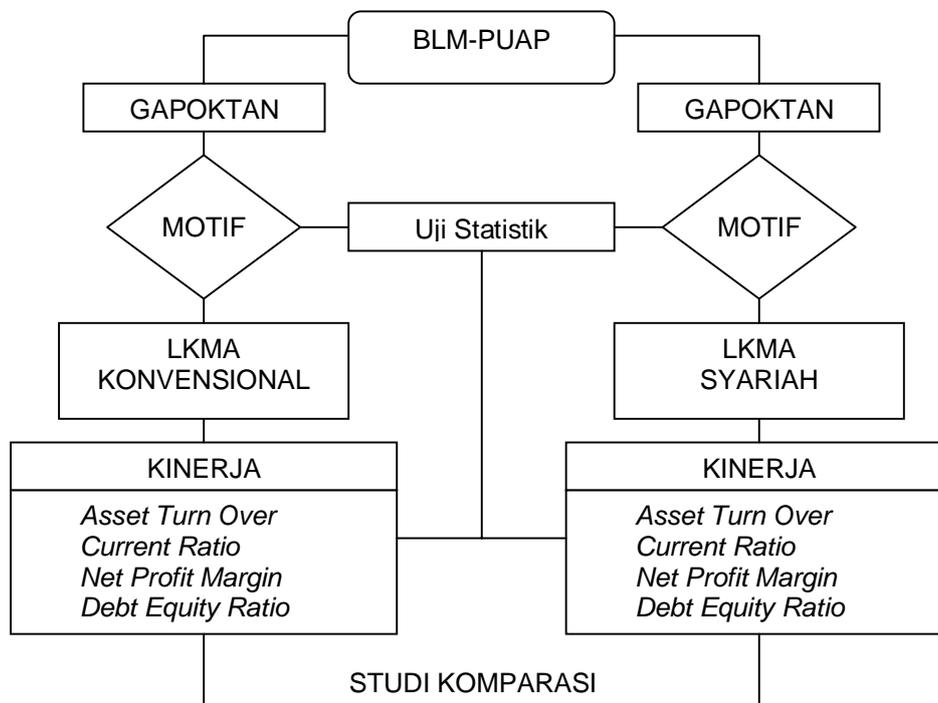
Penelitian ini memiliki tujuan: (1) mengidentifikasi motif pemilihan LKMA PUAP dengan skema syariah atau LKMA PUAP dengan skema konvensional di Jawa Tengah; (2) menentukan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan LKMA PUAP dengan skema syariah dan konvensional di Jawa Tengah; (3) membandingkan kinerja antara

LKMA PUAP skema syariah dengan LKMA PUAP dengan skema konvensional di Jawa Tengah.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Kerangka Pemikiran

LKMA adalah lembaga keuangan mikro yang tumbuh dari gapoktan PUAP dengan fungsi utama mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana swadaya anggota (Kementerian Pertanian, 2010). Dana yang dikelola LKMA dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota dengan skema pembiayaan konvensional (sistem bunga pinjaman) dan skema syariah (*profit loss sharing*) atau sistem bagi hasil. LKMA pada dasarnya merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro yang fungsi utamanya memberi fasilitas pinjaman atau pembiayaan usaha agribisnis untuk para anggota kelompok tani.



Gambar 1 Skema Komparasi Kinerja PUAP Syariah dan Konvensional

Pengukuran kinerja aspek manajemen pengelolaan LKMA pada gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) di tingkat gapoktan PUAP oleh pengurus (Hendriawan, 2012). Bagaimana mengukur kinerja LKM? Hussein (2010) menawarkan tiga indikator penting. Pertama, kinerja ROA atau *Return on Asset*; kedua, nilai Tobin Q yang dihitung dari ekuitas dibagi laba bersih; dan ketiga, likuiditas yang didekati dengan menghitung rasio aset atas liabilitasnya atau rasio lancar. Kinerja LKM juga dapat dilihat dari besarnya tingkat kepercayaan nasabah (pengguna jasa) yang ditunjukkan oleh rasio tabungan atau depositnya. Besarnya deposit menunjukkan tingginya kepercayaan nasabah atau anggota terhadap LKM-nya. Zohra Bi and Pandey (2011) menawarkan neraca laba-rugi, kredit macet, dan rasio kecukupan modal sebagai indikator penting menilai kinerja LKM di India.

Dalam menilai kinerja sebuah lembaga usaha, Keown *et al.* (2011) menawarkan empat katagori kinerja, yaitu: Likuiditas (Rasio Lancar, Rasio Cepat), Profitabilitas (diwakili *Net Profit Margin* (NPM), *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), Solvabilitas (diwakili *Debt Asset Ratio* (DAR), *Debd Equity Ratio* (DER), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Pengembalian Ekuitas (diwakili *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA)). Subramanyam and Wild (2010) dan Margaretha (2011) menambahkan aspek Aktivitas seperti perputaran penjualan per aset (*Asset Turn Over* (ATO)) dan rasio biaya per pendapatan *Expense Ratio* (X/R).

Untuk memberi gambaran yang utuh terhadap kinerja LKMA PUAP, penelitian ini menggunakan empat parameter yang masing-masing mewakili katagori kinerja, yaitu: Rasio Lancar (kinerja Likuiditas), NPM (kinerja Profitabilitas), DER (kinerja Solvabilitas), dan ATO (kinerja Aktivitas).

Seibel (2003) mendefinisikan keuangan mikro sebagai sektor lembaga keuangan formal dan non-formal yang menyediakan layanan simpanan mikro, kredit mikro, investasi mikro, dan asuransi mikro untuk mengembangkan layanan untuk usaha ekonomi mikro. LKM syariah cukup efektif menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di sejumlah negara berkembang. *Mudarabah, musharakah, murabahah, ijarah* termasuk skema pembiayaan yang umum dilayani LKM Syariah di Malaysia. (Rahman, 2010)

Penelitian Khandker (2005) terhadap Grameen Bank di Bangladesh menyimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang saling berkaitan sehubungan dengan kelangsungan hidup dan kinerja lembaga kredit mikro yaitu faktor keuangan, institusi, nasabah dan kondisi ekonomi. Secara spesifik berdasarkan hasil penelitian terhadap LKM di Indonesia, Kaluge *et al.* (2008) menyimpulkan bahwa kesinambungan hidup lembaga kredit mikro tergantung pada tingkat keuntungan yang dipengaruhi oleh faktor besarnya penerimaan, biaya operasional, tingkat angsuran, besarnya bunga pinjaman dan tingkat efisiensi usaha. Riset Sudaryanto dan Sunarja (2009) menambahkan faktor sejarah pembentukan dan kualitas SDM pengurus gapoktan menentukan tingkat keberhasilan PUAP.

Senada dengan Khandker, Zain (2001) mengemukakan empat indikator penting dalam menilai kinerja lembaga kredit mikro yaitu: stabilitas dan kinerja usaha nasabah, pendapatan dan asset anggota binaan, derajat ketergantungan nasabah pada rentenir, dan stabilitas kelangsungan hidup lembaga. Dia mengemukakan bahwa lembaga kredit mikro yang mempunyai kinerja tinggi adalah lembaga yang jumlah nasabahnya semakin banyak dengan nilai pinjaman yang semakin besar, pelayanannya semakin mudah dijangkau, nilai asetnya semakin besar, nilai tabungan anggota binaan semakin tinggi, dan tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi.

Penelitian Kaluge *et al.* (2008) terhadap dua model lembaga kredit mikro di Indonesia pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa kesinambungan hidup lembaga kredit mikro sangat tergantung kepada besarnya biaya operasional dan penerimaan, dimana kedua faktor ini secara bersama-sama menentukan tingkat keuntungan. Secara rinci dikemukakan bahwa besarnya penerimaan/*revenue*, besarnya biaya operasional, tingkat angsuran, tingkat bunga pinjaman dan tingkat efisiensi merupakan variabel-variabel yang memengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup lembaga.

Beberapa penelitian lain menunjukkan penyaluran dana PUAP dirasakan meningkatkan tingkat perekonomian petani anggota gapoktan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Yasin, 2011) dan petani anggota gapoktan penerima di Barito Kuala, Kalimantan Tengah (Anita dan Susilawati, 2011). Meski belum banyak memengaruhi kegiatan usaha tani, PUAP di Kabupaten 50 Kota, Sumbar, menawarkan pinjaman yang lebih ringan dari rentenir (Rusbiana, 2010),

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha mengeksplorasi motif dan alasan gapoktan memilih skema pembiayaan LKMA, membandingkan kinerja keuangan antara LKMA PUAP syariah dan LKMA PUAP konvensional, serta mendalami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh nyata terhadap kinerja keuangan LKMA PUAP syariah dan konvensional.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kombinasi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (ekonometrika). Kombinasi analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor satu. Analisis ini dipakai untuk menjelaskan motif pemilihan skema pembiayaan LKMA, dilengkapi dengan sajian data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor dua dan tiga digunakan analisis kuantitatif (ekonometrika). Metode analisis yang dipakai adalah analisis *multiple regression dummy* variabel dengan menggunakan panel data sampel LKMA PUAP tahun 2008-2011 di lima kabupaten di Jawa Tengah. Analisis ini dilakukan untuk menelaah pengaruh skema pembiayaan syariah, umur lembaga gapoktan, jumlah anggota, jumlah penyertaan modal, jumlah pembiayaan, pendidikan manajer serta keragaman kawasan terhadap kinerja keuangan LKMA yang terwakili oleh indikator likuiditas (Rasio Lancar), profitabilitas (NPM), aktivitas (ATO), dan solvabilitas (DER).

Data yang digunakan adalah gabungan dari data primer dan data sekunder. Data primer dari lapangan adalah data terbaru laporan keuangan masing-masing sampel antara lain tentang jumlah anggota/nasabah, jumlah simpanan (pokok, wajib dan sukarela), penyertaan dana pihak ketiga, besarnya pembiayaan/total pendanaan/pinjaman yang disalurkan, pendapatan usaha simpan pinjam, jasa pinjaman, biaya operasional, laba usaha, bagi hasil atau SHU (sisa hasil usaha), kredit macet, dan jumlah aset. Data sekunder adalah data hasil rekapitulasi yang ada di BPTP Jateng. Motif dan alasan pemilihan skema pembiayaan, identitas, usia dan pendidikan manajer pengelola LKMA termasuk data yang dieksplorasi melalui survei angket dan FGD (*Focus Group Discussion*). Jumlah sampel 185 LKMA PUAP yang tersebar di lima kabupaten: Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal, dan Purbalingga. Sampel data primer beririsan dengan data sekunder.

Untuk analisa deskriptif dilakukan wawancara terstruktur dengan sampel purposif dan skema *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kuestioner tertentu. Karena jumlahnya terbatas, semua populasi LKMA syariah di empat kabupaten selain Purbalingga dijadikan sebagai sampel data primer. Yang menjadi sampel adalah manajer LKMA yang mewakili persepsi pribadi sebagai tenaga pengelola. Kepada setiap sampel (35-40 per kabupaten) diajukan pilihan motif dan alasan pemilihan skema pembiayaan. Ada empat kelompok motif yang ditawarkan: motif agama (sesuai akidah, satu bentuk ibadah, ladang mencari pahala, dan sarana mencari berkah); motif ekonomi (mencari untung, nyaman, transaksi yang adil), motif praktis (mudah, praktis dan aman), motif relasi (pengaruh teman, keluarga, pembina, pimpinan). Masing-masing diukur dengan skala Likert 1-5 untuk katagori: sangat tidak sesuai, tidak sesuai, agak sesuai, sesuai, sangat sesuai.

Provinsi Jawa Tengah dipilih menjadi lokasi penelitian karena dua pertimbangan. Pertama, lebih dari separuh LKMA PUAP ada di kawasan ini. Kedua, wilayah ini memiliki keragaman populasi LKMA PUAP syariah dan PUAP konvensional. yang menarik. Sebagai contoh, ada wilayah dominan LKMA PUAP syariah seperti Kabupaten Purbalingga. Ada wilayah dominan LKMA konvensional seperti Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas. Ada yang wilayah di antara dua ekstrim, dimana LKMA syariah dan

konvensional relatif berimbang, seperti Kabupaten Jepara dan Kendal. Pemilihan wilayah sampel dilakukan secara purposif berdasarkan proporsi keragaman skema pembiayaan.

Ada empat aspek kinerja keuangan yang dipilih sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Pertama, Rasio Lancar (rasio Aset Lancar/Kewajiban Lancar) sebagai representasi dari aspek Likuiditas.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\sum \text{Aset Lancar}}{\sum \text{Kewajiban Lancar}} \quad (1)$$

Kedua, rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) atau Rasio Utang/Ekuitas sebagai wakil aspek kinerja Solvabilitas.

$$\text{Rasio DER} = \frac{\sum \text{Utang}}{\sum \text{Ekuitas}} \quad (2)$$

Ketiga, rasio *Asset Turn Over* (ATO) atau rasio Penjualan/Aset sebagai representasi dari aspek kinerja Aktivitas.

$$\text{Rasio ATO} = \frac{\sum \text{Penjualan}}{\sum \text{Aset}} \quad (3)$$

Keempat, rasio *Net Profit Margin* (NPM) atau rasio Laba Bersih/Penjualan yang menjadi representasi dari aspek kinerja Profitabilitas.

$$\text{Rasio NPM} = \frac{\sum \text{Laba Bersih}}{\sum \text{Penjualan}} \quad (4)$$

Variabel bebas ada sembilan, terdiri dari lima variabel numerik (usia lembaga, modal, biaya, pendanaan/kredit, utang); serta tiga variabel *dummy* (pendidikan manajer, usia manajer, skema pembiayaan, jumlah anggota, dan kawasan). Jumlah modal sendiri bisa dirinci menjadi modal awal (dana BLM), modal sendiri (simpanan anggota), dan modal penyertaan (simpanan) pihak ketiga.

Dalam menganalisis pengaruh motif dalam pemilihan skema LKMA, diajukan model Ekonometrika (Motif) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{MOTIF}_{1-4} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Sharia} + \beta_2 \text{U-LKMA} + \beta_3 \text{Anggota1} + \beta_4 \text{Anggota2} + \\ & \beta_5 \text{Didik1} + \beta_6 \text{Didik2} + \beta_7 \text{Usia1} + \beta_8 \text{Usia2} + \beta_9 \text{Kab1} + \beta_{10} \text{Kab2} + \\ & \beta_{11} \text{Kab3} + \beta_{12} \text{Kab4} + \varepsilon \end{aligned} \quad (5)$$

MOTIF<sub>1-4</sub> adalah motif agama, motif ekonomi, motif praktis, motif relasi.

Model ini dipakai untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi macam-macam motif pemilihan skema pembiayaan LKMA PUAP syariah dan konvensional. Variabel terikat MOTIF<sub>1-4</sub> ada empat macam motif, yaitu: M<sub>1</sub>-Agama (motif karena pertimbangan agama), M<sub>2</sub>-Eko (motif karena pertimbangan ekonomi), M<sub>3</sub>-Prak (motif karena

pertimbangan Praktis), dan M<sub>4</sub>-Rel (motif karena pertimbangan relasi). Sharia, Anggota, Didik, Usia dan Kab adalah variabel *dummy* (katagori), sedang U-LKMA merupakan variabel *numeric*. Dari model ini akan diuji apakah perbedaan skema pembiayaan, usia LKMA, perbedaan usia dan pendidikan manajer, dan perbedaan kawasan berpengaruh terhadap Motif pemilihan skema LKMA.

Dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas terhadap kinerja keuangan, peneliti mengajukan Model Ekonometrika (KINERJA) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KINERJA}_{1-4} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Sharia} + \beta_2 \text{U-LKMA} + \beta_3 \text{Anggota1} + \beta_4 \text{Anggota2} + \\ & \beta_5 \text{Usia1} + \beta_6 \text{Usia2} + \beta_7 \text{Didik1} + \beta_8 \text{Didik2} + \beta_9 \text{Modal} + \\ & \beta_{10} \text{Biaya} + \beta_{11} \text{Utang} + \beta_{12} \text{Kredit} + \beta_{13} \text{Kab1} + \beta_{14} \text{Kab2} + \\ & \beta_{14} \text{Kab3} + \beta_{14} \text{Kab4} + \varepsilon \end{aligned} \quad (6)$$

KINERJA<sub>1-4</sub> adalah Rasio Lancar, Rasio DER, Rasio ATO dan Rasio NPM.

Model ini dipakai untuk melihat pengaruh sejumlah variabel bebas terhadap sejumlah kinerja LKMA antara lain dari sisi Aktvitas (ATO), Profitabilitas (NPM), Rentabilitas (ROE), dan Likuiditas (Rasio Lancar). Ada 10 variabel bebas yang diuji dalam riset ini, yaitu lima variabel *numeric* dan lima variabel *dummy* (katagori). Lima variabel *numeric* adalah usia LKMA (U-LKMA), jumlah modal (Modal), jumlah biaya (Biaya), jumlah utang (Utang), dan jumlah pembiayaan (Kredit). Sedang lima variabel *dummy* adalah perbedaan skema (Sharia), perbedaan jumlah anggota (Anggota), perbedaan usia manajer (Usia), perbedaan pendidikan manajer (Didik), dan perbedaan wilayah geografis (Kab).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 185 sampel penelitian, ada 69 (37,3%) LKMA beroperasi dengan skema syariah, dan 116 (62,7%) beroperasi dengan skema konvensional. Seluruh responden di Kabupaten Purbalingga adalah LKMA yang beroperasi dengan skema pembiayaan syariah (BPTP, 2011). Di Kabupaten Banyumas, ada 36 sampel LKMA yang mengisi kuesioner, tiga sampel atau 8,3 persen dari populasi sampel beroperasi dengan skema syariah. Di kabupaten lain, porsi LKMA syariah berturut-turut adalah 19,4 persen (Banjarnegara), 26 persen (Kendal), dan 34,2 persen (Jepara).

### Motif Pemilihan Skema Pembiayaan

Data hasil penelitian (Tabel 1) menunjukkan, 40,6 persen responden memilih pertimbangan agama sebagai motif pemilihan skema syariah, Responden lainnya, 24,6 persen memilih skema syariah karena motif ekonomi, 18,8 persen memilih skema syariah karena pengaruh relasi, dan 15,9 persen responden memilih skema syariah karena alasan praktis. Hasil FGD mengungkapkan bahwa PUAP syariah dalam persepsi responden dipilih karena skema ini lebih sesuai tuntutan akidah dan sebagai bentuk manifestasi ibadah. Selain itu, dengan memilih LKMA PUAP syariah responden berharap mendapat pahala, keberkahan dan kemaslahatan.

Sementara di lain pihak, para responden LKMA konvensional menunjukkan motif yang berbeda. Sekitar 35,3 persen responden memilih skema konvensional karena alasan praktis dan 30,2 persen responden memilih karena pertimbangan ekonomi. Motif pertimbangan relasi dipilih oleh 21,6 persen responden, dan hanya 12,9 persen responden memilih skema konvensional karena alasan pertimbangan agama. Fakta ini

sepertinya janggal, tapi ini menunjukkan bahwa di kalangan manajer LKMA konvensional (12,9%) ada yang memiliki persepsi skema pembiayaan berbasis bunga tidak bertentangan dengan kaidah agama. Mereka, seperti juga sebagian ulama, masih berpandangan bunga pinjaman yang tidak terlalu besar atau berdasarkan kerelaan dan kesepakatan tidak termasuk riba; karenanya tidak melanggar ketentuan agama.

Tabel 1 Motif Pemilihan Skema LKMA PUAP

Jumlah/Nilai	Motif Agama	Motif Ekonomi	Motif Praktis	Motif Relasi
Syariah	28 (40,6%)	17 (24,6%)	11 (15,9%)	13 (18,8%)
Konvensional	15 (12,9%)	35 (30,2%)	41 (35,3%)	25 (21,6%)

Menurut persepsi responden, LKMA PUAP konvensional lebih praktis, aman, dan akrab dengan kebiasaan keseharian nasabah. Selain itu, mereka memiliki persepsi LKMA PUAP secara ekonomi lebih menjanjikan keuntungan, keadilan dan kenyamanan berusaha bagi para nasabah. Terlihat dari 65 persen responden mengaku memilih PUAP konvensional karena pertimbangan praktis dan ekonomi. Faktor relasi menjadi pertimbangan penting bagi 21,6 persen responden dalam memilih PUAP konvensional, sementara pertimbangan agama hanya diperhitungkan sebagai faktor motif oleh 12,9 persen responden.

Uji F (Anova) menunjukkan bahwa variabel umur lembaga (ULKMA), usia manajer (Usia1, Usia2), pendidikan manajer (Didik1, Didik2), Modal, Utang, Biaya, Kredit, dan keragaman kawasan (Kab1, Kab2, Kab3, dan Kab4) secara simultan berpengaruh nyata terhadap semua motif pemilihan skema pembiayaan LKMA PUAP gabungan, tanpa membedakan PUAP syariah atau konvensional (Tabel 2).

Tabel 2. Uji Anova Motif Pemilihan Skema LKMA PUAP\*

	Gabungan	Syariah	Konvensional
M-Agama			
B	2,468	3,859	2,090
F	48,777	4,594	1,257
Sig	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>	0,264 <sup>a</sup>
M-Ekonomi			
B	4,372	4,476	4,234
F	3,713	1,851	3,567
Sig	0,000 <sup>a</sup>	0,066 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>
M-Praktis			
B	3,858	3,537	4,110
F	1,765	1,691	1,731
Sig	0,042 <sup>a</sup>	0,099 <sup>a</sup>	0,083 <sup>a</sup>
M-Relasi			
B	3,492	3,547	3,455
F	2,587	1,432	3,145
Sig	0,001 <sup>a</sup>	0,184 <sup>a</sup>	0,001 <sup>a</sup>

Keterangan:

\*Menggunakan model regresi berganda Ekonometrika (Motif<sub>1-4</sub>)

<sup>a</sup>Hasil pembulatan sampai tiga desimal

Bagaimana pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap motif pemilihan skema pembiayaan LKMA? Untuk menjawabnya telah dilakukan uji t dimana hasilnya ditampilkan dalam Tabel 3. Dari uji statistik dapat diketahui bahwa variabel perbedaan skema pembiayaan (Sharia) berpengaruh nyata terhadap motif pemilihan skema LKMA PUAP berdasarkan pertimbangan agama (M-Agama), motif pertimbangan ekonomi (M-Ekonomi), dan motif pertimbangan relasi (M-Relasi). Sementara terhadap M-Praktis, pengaruh variabel Sharia tidak nyata. Artinya, para responden, dalam hal ini manajer pengelola LKMA PUAP syariah dan konvensional, memiliki persepsi yang berbeda dalam Motif-Agama, Motif-Ekonomi dan Motif-Relasi. Sementara terhadap Motif-Praktis, dapat dikatakan tak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara responden LKMA syariah dengan responden LKMA konvensional.

Variabel jumlah anggota (Anggota1 dan Anggota2) dan pendidikan manajer (Didik1 dan Didik2) pada level kepercayaan 95 persen tidak berpengaruh nyata terhadap keempat motif pemilihan skema pembiayaan. Artinya, besar kecilnya jumlah anggota LKMA serta tinggi rendahnya tingkat pendidikan manajer LKMA ternyata tidak mempengaruhi M-Agama, M-Ekonomi, M-Praktis, dan M-Relasi.

Tabel 3 Hasil Uji t Motif Pemilihan Skema LKMA PUAP<sup>a</sup>

Variabel	M-Agama		M-Ekonomi		M-Praktis		M-Relasi		
	R <sup>2</sup>		0,847		0,276		0,147		0,188
	B	Sig	B	Sig	B	Sig	B	Sig	
(Constant)	2.512	.000	4.464	.000	.000	.000	3.502	.000	
SHARIA	1.631	.000	.276	.013	.013	.147*	-.302	.017	
U-LKMA	-.005	.849 <sup>†</sup>	.113	.002	.002	.151*	-.024	.557*	
Anggota1	-.030	.683*	-.007	.945*	.945	.889*	-.031	.777*	
Anggota2	.108	.306*	-.108	.427*	.427	.976*	-.085	.583*	
Usia1	.033	.749*	-.158	.234*	.234	.030	.172	.255*	
Usia2	.143	.194*	-.544	.000	.000	.103*	.222	.173*	
Didik1	-.081	.273*	-.003	.979*	.979	.458*	-.015	.892*	
Didik2	.001	.986*	.013	.901*	.901	.909*	-.039	.751*	
KAB1	.495	.000	-.083	.576*	.576	.909*	-.169	.317*	
KAB2	.052	.596*	-.158	.217*	.217	.002	.004	.979*	
KAB3	.172	.047	.043	.727*	.727	.010	-.010	.942*	
KAB4	.132	.176*	.053	.676*	.676	.381	-.581	.000	

Keterangan :

<sup>a</sup> Hasil pengolahan model regresi berganda Ekonometrika (Motif<sub>1-4</sub>)

<sup>†</sup> Tidak signifikan

Secara parsial variabel Sharia, Kab1 dan Kab3 berpengaruh nyata terhadap M-Agama pada level kepercayaan 95 persen. Sebaliknya, variabel usia LKMA, jumlah Anggota, usia manajer, pendidikan manajer, serta perbedaan kawasan di Kab2 dan Kab4 berpengaruh tidak nyata terhadap M-Agama. Model ekonometri M-Agama dapat ditulis sebagai berikut:

$$M\text{-Agama} = 2,512 + 1,631\text{Sharia} + 0,495\text{Kab1} + 0,172\text{Kab3} \quad (7)$$

Nilai positif pada koefisien Sharia menunjukkan bahwa skema Syariah berdampak positif pada Motif pemilihan skema pembiayaan berdasarkan pertimbangan agama. Dalam skala likert, M-Agama dari LKMA PUAP Syariah 1,631 kali lebih tinggi dari M-Agama LKMA PUAP Konvensional. R<sup>2</sup> dari persamaan (7) adalah 0,847 memberi makna bahwa model ekonometrika ini menjelaskan korelasi dari variabel-variabel bebas

terhadap Motif Agama dalam pemilihan skema LKMA sebesar 84,7 persen, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pada level kepercayaan 95 persen, M-Ekonomi dipengaruhi secara nyata oleh variabel Sharia, U-LKMA, dan Usia2. Artinya motif pertimbangan ekonomi dalam memilih skema pembiayaan LKMA PUAP di Jawa Tengah dipengaruhi oleh variabel Sharia, usia LKMA, dan perbedaan usia manajer (terutama pada kelompok usia di atas 40 tahun). Sebaliknya, variabel jumlah anggota (Anggota1 dan Anggota2), perbedaan usia manajer (Usia1), pendidikan manajer (Didik1 dan Didik2), serta perbedaan kawasan tidak nyata berpengaruh terhadap M-Ekonomi. Model ekonometrika M-Ekonomi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{M-Ekonomi} = 4,464 + 0,276\text{Sharia} + 0,113\text{U-LKMA} - 0,544\text{Usia2} \quad (8)$$

Pada model di atas diketahui bahwa variabel Sharia dan usia LKMA berkorelasi positif terhadap M-Ekonomi. Artinya M-Ekonomi LKMA Syariah cenderung 0,276 kali lebih tinggi dari M-Ekonomi LKMA Konvensional. Ketika usia LKMA bertambah matang, maka M-Ekonomi LKMA cenderung bertambah tinggi. Sementara itu, variabel Usia2 berkorelasi negatif terhadap M-Ekonomi. Ini bermakna, pada kelompok manajer usia di atas 40 tahun, ada kecenderungan M-Ekonomi semakin lemah ketika usia manajer bertambah tua.

Dari hasil uji t (Tabel 3) dapat disimpulkan variabel Usia1, Kab2 dan Kab3 secara parsial berpengaruh nyata terhadap M-Praktis. Sebaliknya, variabel Sharia, U-LKMA, jumlah anggota (Anggota1, Anggota2), usia manajer (Usia1, Usia2), pendidikan manajer (Didik1, Didik2), serta perbedaan kawasan Kab1 dan Kab4 tidak nyata berpengaruh terhadap M-Praktis. Secara matematis, model ekonometrika M-Praktis adalah:

$$\text{M-Praktis} = 4,172 - 0,285\text{Usia1} - 0,392\text{Kab2} - 0,314\text{Kab3} \quad (9)$$

Pada model tersebut dapat ditafsirkan bahwa variabel Usia1, Kab2, dan Kab3 berkorelasi negative terhadap M-Praktis. Artinya, M-Praktis cenderung lebih rendah pada LKMA yang dikelola oleh manajer usia muda (kurang dari 30 tahun), pada LKMA yang berlokasi di Kabupaten Jepara dan Kendal.

Hasil uji t juga memberi indikasi bahwa variabel Sharia dan Kab4 berpengaruh nyata terhadap M-Relasi. Sementara itu, variabel U-LKMA, jumlah anggota, usia manajer, pendidikan manajer, serta perbedaan kawasan (Kab1, Kab2, dan Kab3) tidak nyata berpengaruh terhadap M-Relasi. Secara matematis, model ekonometrika M-Relasi adalah sebagai berikut:

$$\text{M-Relasi} = 3,502 - 0,302\text{Sharia} - 0,581\text{Kab4} \quad (10)$$

Pada model ini dapat disimpulkan bahwa variabel Sharia dan Kab4 berkorelasi negatif terhadap M-Relasi. Artinya, LKMA berskema Syariah dan LKMA di Kabupaten Purbalingga cenderung memiliki motif karena pertimbangan relasi yang lebih rendah dibanding LKMA konvensional dan LKMA di kabupaten lainnya.

## Kinerja LKMA

Hasil uji F (Tabel 4), tampak bahwa secara simultan (keseluruhan) variabel-variabel bebas -- Usia LKMA, Modal, Utang, Biaya, Kredit, Skema Pembiayaan (*Sharia*), Jumlah Anggota, Usia Manajer, Pendidikan Manajer, serta Perbedaan Kawasan -- berpengaruh nyata terhadap semua variabel terikat yang diuji. Ini berlaku untuk uji F dengan sampel gabungan (sampel LKMA syariah dan LKMA konvensional digabung),

maupun hasil uji F dengan sampel homogen (sesama LKMA syariah atau sesama LKMA konvensional).

Hasil uji F juga diperoleh gambaran bahwa secara relatif pengaruh simultan variabel bebas terhadap kinerja LKMA syariah tampak lebih kuat pada kinerja Solvabilitas (DER) dan Aktivitas (ATO). Demikian juga pengaruh simultan variabel bebas terhadap kinerja LKMA konvensional tampak lebih kuat pada kinerja Solvabilitas (DER) dan Aktivitas (ATO). Sementara itu, pengaruh simultan variabel bebas terhadap kinerja Profitabilitas (NPM) menunjukkan kecenderungan yang relatif sama antara LKMA PUAP syariah dan LKMA PUAP konvensional.

Tabel 4 Uji Anova Kinerja LKMA PUAP\*

	Gabungan	Syariah	Konvensional
Aktivitas (ATO)			
B	0,962	1,022	0,942
F	47,853	25,022	95,472
Sig	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>
Profitabilitas (NPM)			
B	0,040	0,036	0,053
F	19,438	6,159	6,521
Sig	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>
Solvabilitas (DER)			
B	0,002	0,003	-0,006
F	10254,599	1304,729	9614,678
Sig	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>
Likuiditas(Rasio Lancar)			
B	2,182	2,072	1,599
F	26,798	16,211	13,968
Sig	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>	0,000 <sup>a</sup>

Keterangan :

\*Menggunakan model regresi berganda Ekonometrika (Kinerja<sub>1-4</sub>)

<sup>a</sup>Hasil pembulatan sampai tiga desimal

Secara parsial, berdasarkan hasil uji t (Tabel 5), masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja LKMA PUAP. Variabel perbedaan skema pembiayaan (Sharia), usia LKMA (U-LKMA), pendidikan manajer (Didik1 dan Didik2), jumlah modal (Modal), biaya, dan jumlah utang (Utang) berpengaruh nyata pada level kepercayaan 95% ( $\alpha$  5%). Sementara itu, variabel jumlah Anggota (Member1 dan Member2), usia manajer (Usia1 dan Usia2), Biaya, jumlah pendanaan (Kredit), dan perbedaan Kawasan (Kab1, Kab2, Kab3, dan Kab4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Likuiditas (Rasio Lancar). Dari Tabel 4 dapat dituliskan model ekonometrika Kinerja Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Lancar} = & 2.182 + 0.380\text{Sharia} - 145\text{U-LKMA} + 0,423\text{Didik1} + \\ & 0,587\text{Didik2} - 0,45\text{Utang} - 0,033\text{Biaya} \end{aligned} \quad (11)$$

Hasil dari model ekonometrika diperoleh gambaran bahwa jika ingin meningkatkan kinerja Rasio Lancar LKMA PUAP, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tingkat pendidikan manajer, memberlakukan skema pembiayaan syariah, kemudian mengurangi utang dan biaya, serta menambah modal usaha.

Tabel 5 Hasil Uji t Kinerja LKMA PUAP Syariah dan Konvensional<sup>a</sup>

Variabel	ATO		NPM		DER		Rasio Lancar	
	B	Sig	B	Sig	B	Sig	B	Sig
(Constant)	.962	.000	.044	.001	.002	.041	2.182	.000
SHARIA	-.189	.008	.061	.000	.000	.465*	.380	.004
U-LKMA	-.036	.159*	.000	.955*	.000	.138*	-.145	.003
ANGGOTA1	-.008	.904*	.008	.225*	.001	.320*	.171	.135*
ANGGOTA2	.277	.002	-.007	.472*	.001	.592*	-.081	.610*
USIA1	.035	.695*	-.004	.686*	.002	.206*	.043	.794*
USIA2	.073	.434*	-.008	.420*	.002	.122*	-.079	.648*
KAB1	.236	.010	-.014	.138*	.003	.042	-.123	.460*
KAB2	.047	.569*	.001	.869*	.001	.416*	-.142	.348*
KAB3	.075	.387*	-.003	.714*	.002	.043	-.092	.562*
KAB4	.056	.493*	.006	.493*	.003	.009	.044	.768*
DIDIK1	.068	.342*	.038	.000	.002	.130*	.423	.002
DIDIK2	.156	.109*	.043	.000	.003	.024	.587	.001
MODAL	-.004	.000	.00003	.352*	-.0001	.007	.002	.000
UTANG	.000	.880*	.000	.299*	.010	.000	-.045	.000
BIAYA	-.044	.000	.003	.001	.000	.038	-.033	.048
KREDIT	.006	.000	.000	.000	-.0001	.703*	.000	.731*

Keterangan :

<sup>a</sup> Hasil pengolahan model regresi berganda Ekonometrika (Kinerja<sub>1-4</sub>)

\*Tidak signifikans

Kinerja Aktivitas (ATO) dipengaruhi oleh variabel Sharia, jumlah Anggota (Anggota1), Modal, Kredit, Biaya, dan Kawasan (Kab1). Variabel usia manager (Usia1, Usia2), pendidikan manager (Didik1, Didik2), dan jumlah utang (Utang) tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja ATO. Model ekonometrika Kinerja ATO dapat ditulis sebagai berikut:

$$ATO = 0,962 - 0,189Sharia + 0,277Anggota2 + 0,236Kab1 - 0,004Modal - 0,044Biaya + 0,006Kredit \quad (12)$$

NPM (kinerja Profitabilitas) dipengaruhi oleh variabel Sharia, Pendidikan manager, Biaya, dan Kredit. Sebaliknya, variabel usia LKMA, usia manager, jumlah anggota, perbedaan kawasan, jumlah modal dan jumlah utang tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja NPM. Secara matematika, model ekonometrika Kinerja NPM adalah:

$$NPM = 0,044 + 0,061Sharia + 0,038Didik1 + 0,043Didik2 + 0,003Biaya + 0,0001Kredit \quad (13)$$

Untuk meningkatkan kinerja rasio NPM dari LKMA PUAP yang perlu dilakukan adalah memberlakukan skema syariah, memperbaiki tingkat pendidikan manajer, memperbaiki struktur biaya, serta menambah besaran dan jumlah pinjaman pada nasabah.

Kinerja Solvabilitas (DER) dipengaruhi oleh pendidikan manajer (Didik2), Modal, Utang, Biaya dan perbedaan Kawasan (Kab1, Kab3, dan Kab4). Sementara itu, variabel Sharia, usia LKMA, usia manajer, jumlah anggota dan jumlah Kredit berpengaruh tidak nyata terhadap kinerja DER. Model ekonometrika untuk Kinerja DER sebagai berikut:

$$\text{DER} = 0,002 + 0,003\text{Kab1} + 0,002\text{Kab3} + 0,004\text{Kab4} - 0,0001\text{Modal} + 0,01\text{Utang} + 0,0001\text{Biaya} \quad (14)$$

Makin rendah nilai DER suatu LKMA makin baik kinerja keuangannya karena menunjukkan ketangguhan lembaga itu mengelola rasio utangnya. Rendahnya rasio DER menunjukkan pertumbuhan asset melebihi pertumbuhan utangnya. Untuk memperbaiki kinerja DER suatu LKMA direkomendasikan adanya upaya untuk menambah modal, memperbaiki struktur biaya operasional, berhati-hati dalam mengelola utang, serta memperhatikan kondisi lingkungan dimana nasabah berada.

Hasil dari model ekonometri tersebut dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan (Sharia) berpengaruh nyata terhadap kinerja profitabilitas (NPM), aktivitas (ATO), dan Rasio Lancar (CR). Artinya, ada perbedaan kinerja antara LKMA syariah dan LKMA konvensional dalam tiga indikator keuangan: ATO, NPM, dan Rasio Lancar. Skema syariah berdampak positif terhadap kinerja NPM dan Rasio Lancar. Sebaliknya, terhadap kinerja ATO, skema syariah memberi indikasi dampak negatif. Sementara itu, pengaruh skema syariah terhadap kinerja DER -- meski ada indikasi positif -- tidak dapat disimpulkan. Ini karena perbedaan antara rasio DER LKMA syariah dan DER LKMA konvensional ternyata tidak berbeda secara statistik.

Dibanding kawasan lainnya, lingkungan usaha di Kabupaten Purbalingga terbilang paling kondusif. Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan serta PMT sebagai pembina LKMA terjalin baik dan saling mendukung. Hasil diskusi FGD diketahui bahwa interaksi dan komunikasi antara PMT dengan pengelola LKMA PUAP sudah rutin berjalan. Ada forum tiga bulanan yang mempertemukan PMT, Penyuluh, dan Manajer LKMA. Secara administrasi laporan keuangan masing-masing LKMA terdata cukup rapi dan menggunakan *software* yang sama.

Data riset menunjukkan faktor biaya operasional di Kabupaten Purbalingga relatif paling tinggi dibanding wilayah lainnya. Rata-rata biaya operasional per tahun LKMA PUAP di Purbalingga adalah Rp 6,56 juta, sementara biaya operasional rata-rata LKMA di kawasan lain sekitar 4-6 juta rupiah per tahun. Diskusi FGD diketahui rata-rata honor manajer LKMA di Purbalingga sudah di atas Rp 500 ribu per bulan. Honor rata-rata manajer di kawasan lain, umumnya masih berkisar Rp 300-500 ribu per bulan.

Pengaruh utang terhadap DER tampak jauh lebih kuat dari pengaruh pendidikan, kawasan, biaya dan modal. Maka, untuk menurunkan rasio DER, langkah yang diperlukan pertama-tama adalah menurunkan porsi utang, lalu menambah modal dan memperbaiki struktur biaya operasional. Langkah berikutnya yang bisa diambil adalah memperbaiki lingkungan usaha yang kondusif seperti di Kabupaten Banyumas. Di wilayah ini, unsur aparat desa ikut aktif mempromosikan keberadaan PUAP. Bahkan, sebagaimana terungkap dalam FGD di Banyumas, sejumlah kepala desa dilaporkan meminjamkan fasilitas kantor untuk mendukung operasional LKMA PUAP. Ada kepala desa yang bahkan memberi garansi personal kepada warga yang mau menyimpan dananya di LKMA PUAP setempat.

Perbandingan untuk kinerja ROE, NPM, dan QR antara 2 (dua) skema LKMA bertanda positif. Artinya ROE, NPM dan QR LKMA syariah lebih tinggi dari NPM dan CR LKMA konvensional. Sementara perbandingan antara  $DER_s$  dan  $DER_k$  menunjukkan tanda negatif. Ini juga merupakan indikasi kinerja positif untuk LKMA syariah. Dengan demikian, dari uji beda dapat disimpulkan bahwa kinerja LKMA syariah memang relatif lebih baik dari kinerja LKMA konvensional.

Tabel 6 Hasil Uji *Paired Samples Test* Kinerja LKMA

	Kinerja Syariah - Konvensional	Mean	t	Df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	NPM <sub>s</sub> - NPM <sub>k</sub>	.06472	9.647	68	.000
Pair 2	DER <sub>s</sub> - DER <sub>k</sub>	-.08249	-4.124	68	.000
Pair 3	ATO <sub>s</sub> - ATO <sub>k</sub>	.04601	.558	68	.579
Pair 4	CR <sub>s</sub> - CR <sub>k</sub>	.65685	3.640	68	.001

Sumber: Kuesioner, data diolah (Desember 2012)

Hasil dari uji statistik (Tabel 6) menunjukkan bahwa pengaruh skema syariah menunjukkan tanda positif untuk kinerja NPM, dan Rasio Lancar. Tanda positif untuk rasio NPM dan Rasio Lancar menunjukkan bahwa untuk kinerja profitabilitas dan likuiditas, LKMA syariah lebih baik dari LKMA konvensional. LKMA syariah lebih menjanjikan prospek keuntungan yang lebih tinggi, demikian pula dalam hal kemampuan membayar semua kewajiban-kewajiban lancarnya.

Skema syariah menunjukkan perbedaan yang cenderung negatif untuk kinerja DER. Artinya LKMA syariah punya ketergantungan yang lebih rendah terhadap utang dalam menjalankan operasional usaha simpan pinjamnya. Ini tentu merupakan indikasi positif bagi LKMA syariah.

Hasil uji beda menunjukkan, dalam hal kinerja aktivitas dengan indikator rasio ATO, antara skema syariah dan konvensional tidak berbeda nyata. Jadi pengaruh skema syariah terhadap ATO tidak bisa diambil keputusan karena level kepercayaannya rendah. Meski begitu, secara rata-rata, kinerja aktivitas LKMA syariah cenderung lebih baik.

Akhirnya, dengan data, fakta, dan analisis riset ini dapat disimpulkan bahwa di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal dan Purbalingga, LKMA PUAP syariah memiliki rata-rata kecenderungan kinerja yang relatif lebih baik dari LKMA PUAP konvensional.

Fakta riset telah menunjukkan bahwa dari sisi kinerja keuangan LKMA syariah lebih baik dari yang konvensional. Di sisi lain, kita juga mendapatkan realitas bahwa populasi LKMA syariah masih kalah jauh dari LKMA konvensional. Apa yang bisa dijelaskan dari fenomena unik dan menarik ini? Keberadaan LKMA syariah dalam peta LKMA PUAP di Indonesia ini seperti barang bagus yang belum banyak dipilih orang karena sebagian besar orang tidak mengetahui barang itu betul-betul bagus dan sangat diperlukan. Bisa juga orang tahu barang itu bagus, tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana cara mendapatkannya.

Kurangnya sosialisasi dan terbatasnya akses terhadap pasar merupakan faktor utama yang bisa menjelaskan mengapa LKMA syariah belum menjadi pilihan utama. Hasil diskusi di forum-forum FGD di lima kabupaten sampel, terungkap bahwa banyak manajer LKMA mengakui tidak paham tentang karakteristik dan kelebihan syariah dibanding konvensional, yang mereka rasakan adalah untuk mengelola LKMA dengan skema syariah butuh persiapan dan pelatihan yang lebih lanjut. Di wilayah sekitar

keberadaan PUAP tidak banyak ditemukan contoh praktik muamalah berskema syariah. Umumnya mereka kenal adalah praktik simpan pinjam ala koperasi dan pinjaman lewat rentenir.

Pada tahap awal penyaluran dana BLM PUAP diakui oleh para responden ada pelatihan singkat. Pelatihan itu dirasakan masih sangat singkat, dengan materi yang bersifat normatif dan umum, belum menyentuh muatan spesifik tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing skema pembiayaan. Sebagian besar responden menyatakan tidak ada arahan dan bimbingan khusus tentang seluk-beluk LKMA syariah. Hanya sejumlah responden di Kabupaten Purbalingga yang menyatakan ada bimbingan dari PMT (Penyelia Mitra Tani) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengelola BMT dan atau koperasi syariah.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian, hasil analisis dan pembahasan atas data penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. LKMA PUAP syariah dipilih karena pertimbangan agama, pertimbangan ekonomi, pertimbangan relasi dan karena alasan praktis. Sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis, pertimbangan ekonomi, dan pertimbangan relasi. Persepsi responden, LKMA PUAP syariah dinilai lebih sesuai tuntutan akidah, bentuk manifestasi ibadah, ladang harapan mendapat pahala, keberkahan dan kemaslahatan. LKMA PUAP konvensional dinilai lebih praktis, aman, dan akrab dengan kebiasaan keseharian anggota. Hasil uji statistik menunjukkan motif pemilihan skema pembiayaan LKMA dipengaruhi secara nyata oleh skema pembiayaan (Sharia), tingkat pendidikan (Didik), dan perbedaan kawasan (Kab). Motif pemilihan skema juga berbeda antara responden pemilih LKMA syariah dan responden pemilih LKMA konvensional.
2. Faktor yang memengaruhi kinerja LKMA PUAP syariah dan konvensional secara simultan adalah skema pembiayaan, usia LKMA, jumlah anggota, usia dan pendidikan manajer, modal, biaya, kredit, utang, dan kawasan. Secara parsial masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja LKMA PUAP. Variabel Sharia, jumlah Anggota, usia manajer (Usia), Modal, Biaya, Utang dan Kawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Likuiditas (Rasio Lancar). Kinerja Aktivitas (ATO) dipengaruhi oleh variabel Sharia, Modal, Kredit, Biaya, usia LKMA (ULKMA), jumlah Anggota dan Kawasan. NPM (kinerja Profitabilitas) dipengaruhi oleh variabel Sharia, Pendidikan manajer, Kawasan, Utang, Biaya, Anggota, dan Usia manajer. Dan, Kinerja Solvabilitas (DER) dipengaruhi oleh Sharia, Modal, Utang, Kawasan, dan ULKMA.
3. Kinerja antara LKMA syariah dengan LKMA konvensional berbeda. Nilai kinerja Profitabilitas (NPM), Likuiditas (Rasio Lancar), dan Solvabilitas (DER) LKMA syariah lebih baik dari konvensional. Kinerja ATO antara LKMA syariah dan konvensional tidak signifikan perbedaannya, meski secara rata-rata ATO LKMA PUAP syariah sedikit lebih baik. Maka, dapat dikatakan, di Jawa Tengah, kinerja LKMA PUAP syariah lebih baik dari LKMA PUAP konvensional.

Merujuk kepada hasil riset ini, peneliti dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Skema LKMA PUAP syariah belum menjadi pilihan karena beberapa alasan: minimnya informasi yang memadai tentang cetak biru pengelolaan LKMA PUAP berbasis syariah, terbatasnya jumlah SDM yang kompeten, dan kurang intensifnya

komunikasi antara manajer dan PMT maupun antar PMT dan pembina teknis di kabupaten dan provinsi, terutama dalam proses pembentukan dan operasionalisasi awal LKMA PUAP. Untuk itu, penulis mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pusat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian perlu segera menyusun cetak biru dan panduan praktis pengelolaan LKMA PUAP berbasis syariah beserta langkah-langkah sosialisasi yang masif dan internalisasinya yang memadai.
  - b. Badan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah perlu memfasilitasi adanya pendidikan dan pelatihan khusus untuk mempersiapkan SDM yang cakap, jujur, amanah dan profesional, serta pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengelola LKMA dan gapoktan PUAP.
  - c. BPTP dan Dinas Pertanian terkait perlu memfasilitasi adanya forum komunikasi dan interaksi yang lebih teratur, terstruktur dan terukur antara manajer LKMA dan pengelola gapoktan, antara manajer dan PMT, serta antar PMT dan pembina teknis di kabupaten dan provinsi untuk mengatasi dan mengantisipasi setiap masalah yang muncul.
2. Untuk pendalaman, perlu dilakukan riset selanjutnya dengan mengambil sampel yang sebaran populasinya lebih besar. Responden penelitian sebaiknya juga tidak beragam agar terjadi proses *check and balance* antar kelompok responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A.S.; & U. Salawati. 2011. Analisis Pendapatan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 01(04): 285-288.
- Apriyantono, A. 2009. *Kebangkitan Pembangunan Pertanian Indonesia*. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian RI.
- Apriyantono, A. 2011. *Memory Akhir Jabatan Menteri Pertanian RI 2004-2009*. Jakarta: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan RI.
- Bi, Z. and S.L.D. Pandey. 2011. Comparison of Performance of Microfinance Institutions with Commercial Banks in India. *Australian Journal of Business and Management Research* 1(6): 110-120.
- BPS. 2012. *Data Strategis BPS Indonesia 2012 : Beberapa Indikator Sosial Ekonomi*. Jakarta.
- BPTP Jawa Tengah. 2011. *Laporan Perkembangan LKMA PUAP di Jateng 2008-2011*. Semarang: BPTP Jateng.
- Hendiawan, M. 2012. *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program PUAP 2008-2011*. Jakarta: Pusat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
- Hendriawan, M. 2011. *Pedoman Umum PUAP*. Jakarta: Pusat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
- Hussein, K. 2010. Bank-level Stability Factors and Consume Confidence: A Comparative Study of Islamic and Conventional Bank Product Mix. *Journal of Financial Services Marketing*, 15(3): 259-270. [www.palgrave-journals.com/fsm](http://www.palgrave-journals.com/fsm).
- Kaluge, D., M.H. Susanto, dan Dwiyo. 2008. Analisis Fenomenologi Bank Mendirikan Koperasi Kredit. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(1): 1-21.

- Kementan RI. 2010. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta : Pusat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan RI.
- Keown, A.J., J.D. Martin, J.W. Petty, and D.F. Scott. 2011. Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan. (Marcus Prihmindo Widodo, Trans). Jakarta: Indeks.
- Khan, A.A. 2008. Islamic Microfinance: Theory, Policy and Practice. Birmingham: Islamic Relief Worldwide.
- Khandker, S.R. 2005. Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh. *World Bank Econ Rev* (2005) 19(2): 263-286.
- Khandker, S.R. and R.R. Farugee. 2001. The Impact of Farm Credit in Pakistan, World Bank Technical Paper No. 258, Washington, DC.
- Margaretha, F. 2011. Manajemen Keuangan: Untuk Manajer non-Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, A.R. 2010. Islamic Microfinance: an Ethical Alternative to Poverty Alleviation. *Humanomics*, 26(4): 284-295.
- Range, M. 2004. Islamic Microfinance. Research Center of International Technical and Economical Cooperation. Aschen: Faculty of Business Administration, Aachen University.
- Rusbina, E. 2010. Analisis Komparatif Sistem Usaha Tani Padi Sawah antara Pra PUAP dan Masa PUAP Anggota Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang, Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas
- Seibel, H.D. dan D.W. Agung. 2005. Microfinance in Indonesia: Institutional Viability & Sustainability and Their Compatibility with Outreach to the Poor." Jakarta: GTZ Jerman.
- Seibel, H.D., 2003. History Matters in Microfinance. *International Journal of Microfinance and Business Development*, 10-12.
- Subramanyam, K.R. and J.J. Wild. 2010. Analisis Laporan Keuangan. 10<sup>th</sup> Ed. (Dewi Yanti, Trans). Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryanto, T. 2010. PUAP Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan RI.
- Sudaryanto, T. dan R. Sunarja. 2009. Penentuan Lokasi dan Evaluasi Kinerja Serta Dampak PUAP. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan RI.
- Yasin, A. 2011. Strategi Keberlanjutan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (kasus Kabupaten Karawang). Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Zain, M.Y. 2001. Technology Policy and Smes in Indonesia: Reviewing the Economic Development Strategy For The Poor. *Journal Economic Resources*, II(5): 131-156.